



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES  
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap organisasi perangkat daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perserorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
8. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
9. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
10. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatas akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan Klasifikasi Keamanannya.
12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.
13. Biasa/ Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
16. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan / penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan / penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
17. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otoritas legal pemanfaatan informasi publik.
18. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

19. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, dan
- b. pengaturan akses arsip.

## BAB IV SESTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

### Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

### Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia;
  - b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
  - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
  - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi :
- a. sarana menyimpan arsip konvensional berupa lemari arsip untuk menyimpan arsip biasa/ terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia.
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi, dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi :
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif
- Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (5) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
- a. 000 Umum
  - b. 100 Pemerintahan
  - c. 200 Politik
  - d. 300 Keamanan dan Ketertiban
  - e. 400 Kesejahteraan
  - f. 500 Perekonomian
  - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
  - h. 700 Pengawasan
  - i. 800 Kepegawaian
  - j. 900 Keuangan

## BAB V PENGATURAN AKSES ARSIP

### Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
- a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
  - b. pengguna eksternal di luar instansi.

### Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :
- a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
    - 2) pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan

- 3) pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
  - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
  - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/ terbuka;
  - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
  - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

#### Pasal 9

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis sebagai berikut:
- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas Umum;
  - b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
  - c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas Politik;
  - d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
  - e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
  - f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
  - g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
  - h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
  - i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
  - j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kategori arsip biasa/umum/ terbuka disimpan pada rak besi;
  - b. kategori arsip terbatas disimpan pada lemari arsip; dan

- c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan /atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal *16 Agustus* 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto  
YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal *16 Agustus* 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto  
ZEFNIHAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR *39*.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
↳ KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 1

  
WANDRI RAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 19710705 199803 1 011

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG**  
**NOMOR 39 TAHUN 2018**  
**TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN**  
**DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG**

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garuda</li> <li>- Bendera kebangsaan</li> <li>- Daerah</li> <li>- Provinsi</li> <li>- Kota /kabupaten</li> </ul>				
	002	Penghargaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bintang</li> <li>- Satya lencana</li> <li>- Samkarya nugraha</li> <li>- Monumen</li> <li>- Penghargaan secara adat</li> <li>- Penghargaan lainnya</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari /Raya Besar Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb,</li> <li>- Keagamaan- Idul Fitri- Natal dll</li> <li>- Hari Ulang Tahun (HUT)</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

004	Ucapan - ucapan selamat - ucapan belasungkawa - ucapan lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
005	Undangn	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
006	Tanda Jabatan - pamong praja - tanda pengenal - pejabat lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	<b>URUSAN DALAM</b>				
010	<b>URUSAN DALAM</b>				
011	Gedung Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
012	Rumah Dinas - tanah untuk rumah dinas - prabotan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
013	Mess Guest/ House	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
014	Rumah Susun / Apartemen	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
016	Telepon/ Faksimili/ Internet	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
017	Kcamamanan / Ketertiban Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
018	Kebersihan Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
019	Protokol - upacara bendera - tata tempat - pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		- audiensi - alamat- alamat Kantor dan Pejabat - sambutan					
3	020	<b>PERALATAN</b> - Penawaran / Ekspose	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	021	Alat Tulis	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	022	Mesin Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	023	Pejabat Kantor	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	024	Alat Angkutan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	025	Pakaian Dinas	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	026	Senjata	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	027	Pengadaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	028	Inventaris	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
4	030	<b>KEKAYAAN DAERAH</b>					
	031	Sumber Daya Alam	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	032	Aset Daerah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	040	PERPUSTAKAAN / DOKUMENTASI/ KEARSIPAN / SANDI					

041	Perpustakaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
042	Dokumentasi - foto - audio - video	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
045	Kearsipan - pola klasifikasi - penataan berkas - penyusutan arsip - pembinaan kearsipan - pemeliharaan/ perawatan arsip	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
046	Sandi - peralatan - sistem - sumber daya manusia - pembinaan persandian	Rahasia	Eselon III	memiliki dampak keamanan/rahasia neagara	Bidang Teknis
5	050 <b>PERENCANAAN</b> - pelita daerah - bantuan pembangunan daerah - bappeda - perencanaan / proyek bidang peralatan - bidang perpustakaan - bidang kearsipan - bidang sandi - organisasi / ketatalaksanaan - penelitian	Terbatas		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub.bagian, sub.bidang
051	Bidang Pemerintahan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
052	Bidang Politik	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis



054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
055	Bidang Perekonomian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
057	Bidang Pengawasan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
058	Bidang Kepegawaian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
059	Bidang Keuangan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	<b>060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN</b>				
061	Organisasi Pemerintah - susunan dan tata kerja - tata terth kantor, jam kerja	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
063	Organ Badan Internasional	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
064	Organisasi semi pemerintah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
065	Ketatalaksanaan/ Tata Naskah/ Sistem	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
066	Stempel Dinas	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
067	Pelayanan Umum	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
068	Komputerisasi/ Siskomendagri	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

7	070	<b>PENELITIAN</b>					
	071	Riset	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	072	Survey	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	073	Kajian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	074	Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	075	Departemen	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	076	Non Departemen	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	077	Provinsi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	078	Kabupaten/Kota	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	079	Kecamatan /Desa	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
8	080	<b>KONFERENSI</b>					
	081	Gubernur	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	082	Bupati / Wali Kota	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	083	Komponen Eselon lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	084	Instansi lainnya	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	085	Internasional Di dalam Negeri	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	

086	Internasional di luar Negeri	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	<b>PERJALANAN DINAS</b>				
090	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
091	Perjalanan Menteri ke dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
092	Perjalanan Pejabat Tinggi ( Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
093	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
094	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
095	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
096	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
097	Perjalanan Pejabat ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
098	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 1

WANDRI FAHRIZAL,SH

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUJUNJUNG  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN  
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SUJUNJUNG

II. PEMERINTAHAN

No	Klasifi kasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
130	131	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Bupati / Walikota meliputi				
		- pencalonan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pelantikan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- pemberhentian	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- berita acara serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- meninggal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- memori Kepala Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
131		Sambutan / Pengarahan/ Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

132	Wakil Bupati						
	- pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- pemberhataan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- berita acara serah terima jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
133	- Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota meliputi						
	- pencalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- meninggal	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	- pemberhentian	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	Muspida	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		
	Forum Ban ( Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis		

	Forum Koordinasi lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Kerjasama antar Kabupaten / Kota	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
135	Pembentukan / Pemekaran Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati / Wai Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Ibu/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Sambutan / Pengarahan / Amanat	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Perwalian Kecamatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

139	Laporan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Monitoring	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Evaluasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN				
141	Pamong Desa, meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
142	Penghasilan Pamong Jasa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
143	Kekayaan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
144	Dewan Tingkat Desa/ Kelurahan, Dewa, Marga, Rembung Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
145	Administrasi / Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
146	Kewilayahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perubahan atas Wilayah/ Perluasan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Kerjasama antar Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

147	Lembaga -Lembaga Tingkat Desa, jangan Klasifikasikan disini, lihat 410 dengan perinciannya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Kepala Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Staf Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Rukun Tetangga	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Rukun Warga	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	DPDR/KABUPATEN/KOTA				
170	Keanggotaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemberhentian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Recall	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pelanggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
172	Persidangan - resea	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
173	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Keungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
174	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	HUKUM				
	Konstitusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Dasar Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Undang- Undang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
181	Perdata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Rumah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Utang/ Putang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
182	Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Peyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
183	Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Bantuan Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
184	Hukum Internasional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
185	Imigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Visa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pasport	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Exit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Reentry	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Lintas Batas / Batas Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
186	Rumah Tahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
187	Kejaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
188	Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Peraturan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Peraturan Kabupaten Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Keputusan Bupati / Walikota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	197	Kerjasama dengan lembaga Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 3,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI  
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

■ II. POLITIK

No	Klasif kasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
		- Kebijakan Umum - Order Baru - Reformasi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	210	KEPARTAIAN Meiiputi : - Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembubaran - Lambang Partai - Kartu Tanda Anggota - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	220	- Bantuan Keuangan Parpol - Rapat Koordinasi Konsolidasi Partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	221	ORGANISASI KEMASYARAKATAN - Berdasarkan Perjuangan - Berkas tentang Perjuangan Perintis Kemerdekaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas tentang perjuangan angkatan 45</li> <li>- Berkas Tentang Perjuangan Veteran</li> </ul>					
222	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Kekaryaan</li> <li>- Kekaryaan Pepabri</li> <li>- Kekaryaan Wredatama</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
223	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Kerohanian</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
224	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Adat</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
3	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL					
231	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikatan Dokter Indonesia</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
232	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persatuan Guru Republik Indonesia</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
233	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persatuan Sarjana Hukum Indonesia</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
234	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persatuan Advokat Indonesia</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	

235	- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
236	- Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
237	- Persatuan Wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
238	- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
239	- Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
4	ORGANISASI PEMUDA						
241	- Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
242	- Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
243	- Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		



	244	- Organisasi Kepemudaan Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN, DAN ANGKUTAN				
	251	- Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	252	- Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	- Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	254	- Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	255	- Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	260	ORGANISASI WANITA				
	261	- Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

262	- Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
263	- Pemberdayaan Perempuan						
264	- Kongres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
265	- Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis		
7	270	PEMILIAHAN UMUM					
	271	- Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	272	- Nomor Urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	273	- Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	274	- Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	275	- Pemilih / Daftar Pemilih	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	

276	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana</li> <li>- Sarana TPS</li> <li>- Sarana Kendaraan</li> <li>- Sarana Suara</li> <li>- Kotak Suara</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
277	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemungutan Suara/ Penghitungan Suara</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
278	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan Sumpah/ Janji anggota MPR, DPR, DPD</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	PILKADA				
280	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
281		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
282	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor urut Partai/ Tanda Gambar</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
283	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampanye/ Dana</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
284	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas Pemilu</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
285	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilih/ Daftar Pemilih</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN  
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No	Klasifi kasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN / KETERTIBAN				
	301	- Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	- Penerbitan PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	- PSK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	304	- Gepeng	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	- PPNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	- Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang, Seksi Subag

312	- Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis		
313	- Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis		
314	- Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis		
3	320	KEMILITERAN					
	321	- Latihan Militer	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
	322	- Wajib Militer	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
	323	- Operasi Militer	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
	324	- Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
	325	- Pejabat Sipil dari ABRI/ TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
	4	330	KEAMANAN				
		331	- Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis
		332	- Huru Hara / Demostrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis
		333	- Senjata Api / Senjata Tajam	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis

334	- Bahan Peledak	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
335	- Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
336	- Surat-Surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
337	- Pengaduan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
338	- Himbauan /Larangan	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	- Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biase/ Terbuka			
	350	KEJAHATAN	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	351	- Makar / Pemberontakan	Rahasia			
	352	- Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis
	353	- Penganiayaan, pencurian, dan perampasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis
	354	- Subversi/ Penyelundupan/ Narkotika	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis

355	- Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Bidang Teknis	
356	- Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
357	- Permokasaan / Pembuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
358	- Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
359	- Kejahatan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
7	360	BENCANA				
	361	- Gunung Berapi/ Gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak	Bidang Teknis
	362	- banjir /Tanah Longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	- Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	Kebakaran - Pembinaan - penanggulangan - pencegahan - pemadaman - pengujian instalasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	- antispasi - proteksi, APAR - kebutuhan sarpras					
365	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
366	Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
8	KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
371	- Darat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
372	- Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
373	- Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
374	- Sungai/ Danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 59 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN  
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT		5		
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	402	Bantuan Langsung Tunai	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	404	Askeskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	405	Jamkessos / Jamkesda	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN				
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
	412	a. Swadaya Gotong Royong - penataan gotong royong - gotong royong dinamis - gotong royong statis - pungkutan  b. Lembaga Sosial Desa (LSD) - pembinaan - klasifikasi - proyek - musyawarah desah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis

	<p>c. Latihan Kerja Masyarakat ( LKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kader masyarakat</li> <li>- kuliah kerja nyata ( KKN)</li> <li>- pusat latihan</li> <li>- kursus- kursus</li> <li>- kurikulum/ syllabus</li> <li>- keterampilan</li> <li>- pramuka</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota ( LPMK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	e. Badan Kewasdayaan Masyarakat (BKM)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	<p>1. program</p> <p>2. pembinaan organisasi</p> <p>3. kegiatan</p>					
	g. Penyuluhan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	<p>1. publikasi</p> <p>2. peragaan</p> <p>3. sosio drama</p> <p>4. siaran pedesaan</p> <p>5. penyuluhan lapangan</p>					
	h. Kelembagaan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	<p>1. kelompok tani</p> <p>2. rukun tani</p> <p>3. subak</p> <p>4. dharmatirta</p>					
412	<b>PEREKONOMIAN DESA</b>					
	a. Produksi desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	<p>1. pengolahan</p> <p>2. pemasaran</p>					



413	PRASARANA DESA	<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Eselon III</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja</p> <p>Bidang Teknis</p>	<p>a. Prasarana Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan</li> <li>2. bimbingan teknis</li> </ol>
		<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Eselon III</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja</p> <p>Bidang Teknis</p>	<p>b. Pemukiman Kembali Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lokasi</li> <li>2. diskusi</li> <li>3. pelaksanaan</li> </ol>
		<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Eselon III</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja</p> <p>Bidang Teknis</p>	<p>c. Masyarakat Pradesa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan</li> <li>2. penyuluhan</li> </ol>
		<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Eselon III</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja</p> <p>Bidang Teknis</p>	<p>d. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah sehat</li> <li>2. proyek printis</li> <li>3. pelaksanaan</li> <li>4. pengembangan</li> <li>5. perbaikan kampung</li> </ol>
414	PEMBANGUNAN DESA		
		<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Eselon III</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja</p> <p>Bidang Teknis</p>	<p>a. Tingkat Pembangunan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah desa</li> <li>2. pemekaran desa</li> <li>3. pembentukan desa baru</li> <li>4. evaluasi</li> <li>5. bagan</li> </ol>
		<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Eselon III</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja</p> <p>Bidang Teknis</p>	<p>b. Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyuluhan program</li> <li>2. lokasi UDKP</li> </ol>

	3. pelaksanaan 4. bimbingan / pembinaan 5. evaluasi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	c. Tata Desa  1. inventarisasi 2. penyusunan pola tata desa 3. aplikasi tata desa 4. pemetaan 5. pedoman pelaksanaan 6. evaluasi				
	d. Perlombaan Desa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	1. pedoman 2. penilaian 3. kejuaraan 4. piagam				
415	KOORDINASI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	a. Sektor Khusus	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang koordinasi sector khusus di pemerintahan Kabupaten Sijunjung				
	b. Rapat Koordinasi Horizontal ( RKH)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis

		Berkas tentang rapat koordinasi ahorizontal dengan lembaga di lingkungan internal dan eksternal pemerintah Kabupaten Siunjung					
		c. Tim Koordinasi Pusat (TKP)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		Berkas tentang tim koordinasi pusat					
		d. Kerja Sama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		1. Luar Negeri (UNICEF) 2. perguruan tinggi 3. dapartemen / lembaga non departemen					
3	420	PENDIDIKAN					
	421	SEKOLAH					
		a. pra sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		b. Sekolah Dasar / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		c. Sekolah Menengah / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		d. Sekolah Tinggi / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		e. Sekolah Kejuruan / Sederajat	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	

	f. Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	g. Kegiatan Pelajar 1. Reuni, Dharmawisata 2. Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS) 3. Pelajar Teladan dan 4. Resimen Mahasiswa ( MENWA)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	h. Sekolah Didikan Luar Biasa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	i. Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasa Buta Huruf	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
422	ADMINISTRASI SEKOLAH				
	a. Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, pendaftaran, mampiras, perpeloncoan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	b. tahun pelajaran	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	c. hari libur	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	d. uang sekolah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	e. bea siswa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

	f. biaya operasional siswa ( BOS)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
423	<b>METODE BELAJAR</b>				
	a. kuliah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	b. ceramah, simposium	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	c. diskusi	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	d. kuliah lapangan, widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	e. kurikulum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	f. karya tulis	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	g. ujian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
424	<b>TENAGA PENGAJAR</b> Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector, dan guru teladan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
425	<b>SARANA PENDIDIKAN</b>				
	a. gedung 1. gedung sekolah 2. kampus 3. pusat kegiatan mahasiswa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis

		<p>b. buku berkas tentang buku pelajaran dan diklat kuliah</p> <p>c. per lengkapan Sekolah berkas tentang per lengkapan sekolah</p>	<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p> <p>Bidang Teknis</p>
	426	<p>KEOLAHRAGAAN</p> <p>a. cabang olah raga</p> <p>b. sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. gedung olah raga</li> <li>2. stadion</li> <li>3. lapangan</li> <li>4. kolam renang</li> </ol> <p>c. pesta olah raga</p> <p>d. KONI</p>	<p>Biasa / Terbuka</p> <p>Biasa / Terbuka</p> <p>Biasa / Terbuka</p> <p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p> <p>Bidang Teknis</p> <p>Bidang Teknis</p> <p>Bidang Teknis</p>
	427	<p>KEPEMUDAAN</p> <p>Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja</p>	<p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p>
	428	<p>KEPRAMUKAAN</p>	<p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p>
	429	<p>PENDIDIKAN KEDINASANAN DEPDAGRI</p>	<p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p>
4	430	<p>KEBUDAYAAN</p>	<p>Biasa / Terbuka</p>	<p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja</p>	<p>Bidang Teknis</p>

	431	KESENIAN					
		a. cabang kesenian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		b. sarana berkas tentang gedung kesenian	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
	432	KEPERBUKALAN					
		a. museum	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
		b. peninggalan kuno 1. candi, termasuk pemugaran 2. benda peninggalan kuno	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
	433	SEJARAH	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
	434	BAHASA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
	435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
	436	KEPERCAVAAN Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis	
5	440	KESEHATAN					

441	PEMBINAAN KESEHATAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. gizi</li> <li>b. mata</li> <li>c. jiwa</li> <li>d. kanker</li> <li>e. usaha kesehatan sekolah (UKS)</li> <li>f. perawatan</li> <li>g. penyuluhan kesehatan</li> <li>h. masyarakat (PKM)</li> <li>i. Pekan Imunisasi Nasional</li> </ul>				
442	OBAT- OBATAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengadaan</li> <li>b. penyimpanan</li> </ul>				
443	PENYAKIT MENULAR				
	a. pencegahan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	b. pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung (P2ML)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	c. Epidemiologi dan Karantina (Epidika)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. kholera</li> <li>2. imunisasi</li> <li>3. survailense</li> <li>4. rabies/ anjing gila, antraks</li> </ul>				

		<p>d. pembarantasan dan pencegahan penyakit menular sumber binatang (P2B)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. malaria</li> <li>2. dengue faemorrhagic fever ( demam berdarah HDF)</li> <li>3. filaria</li> <li>4. serangga</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		<p>e. Hygiene Sanitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tempat- tempat pembuatan dan</li> <li>2. penjualan makanan dan minuman (TPMM)</li> <li>3. Sarana air minum dan jamban keluarga (samjiaga)</li> <li>4. pestisida</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
444	GIZI	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekurangan makanan, bahaya kelaparan, busung lapar</li> <li>b. keracunan makanan</li> <li>c. menu makanan rakyat</li> <li>d. badan perbaikan gizi dan daerah ( BPGD)</li> <li>e. program makanan tambahan anak sekolah ( PMT-AS)</li> </ol>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis

445	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, POLIKLINIK, POSYANDU	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
446	TENAGA MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
447	ALAT MEDIS	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
448	PENGOBATAN TRADISIONAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
6	AGAMA				
450	AGAMA				
451	ISLAM				
	a. peribadatan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	1. sholat				
	2. zakat, fitra				
	3. puasa				
	4. MTQ				
	b. Rumah ibadah	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	c. tokoh agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	d. pendidikan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	1. tinggi				
	2. menengah				
	3. dasar				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. pondok pesantren</li> <li>5. gedung sekolah</li> <li>6. tenaga pengajar</li> <li>7. buku</li> <li>8. dakwah</li> <li>9. organisasi/ lembaga pendidikan</li> <li>10. TPA/TQA/ TPQ</li> </ul>					
		e. Harta Agama	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
		f. peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
		g. organisasi keagamaan bukan politik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
		h. mazhab	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	452	KRISTEN PROTESTAN					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peribadat</li> <li>b. rumah ibadah</li> <li>c. tokoh agama/ rohaniawan</li> <li>d. pendeta / domine</li> <li>e. mazhab</li> <li>f. organisasi gerejani</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
	453	KATHOLIK					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peribadatan</li> <li>b. rumah ibadah</li> <li>c. tokoh agama/ rohaniawan</li> <li>d. pastor</li> </ul>	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	

	e. mazhab f. organisasi grejani					
454	HINDU a. peribadatan b. ruamah ibadah c. tokoh agama/ rohaniawan d. mazhab e. organisasi keagamaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
455	BUDHA a. peribadatan b. ruamah ibadah c. tokoh agama/ rohaniawan d. mazhab e. organisasi keagamaan	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
456	URUSAN HAJI a. ONH b. umroh c. manasik	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
7	460 SOSIAL 461 REHABILITASI PENDERITA CACAT	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	
462	TUNA SOSIAL a. gelandangan b. ibu teladan c. keluarga sakinah d. anak asuh	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis	

463	KESEJAHTERAAN ANAK/ KELUARGA	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	a. anak putus sekolah b. ibu teladan c. keluarga sakinah d. anak asuh				
464	PEMBINAAN PAHLAWAN	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	a. pahlawan b. perintis kemerdekaan c. cacat veteran				
465	KESEJAHTERAAN SOSIAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	a. lanjut usia b. korban kekacauan, pengungsi, repatriasi				
466	SUMBANGAN SOSIAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	a. korban bencana b. pencarian dana untuk sumbangan c. panti asuhan d. panti jompo				
467	BIMBINGAN SOSIAL	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, pemukiman untuk masyarakat suku terasing				
468	PMI	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis

	469	MAKAM	Biasa / Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	470	KEPENDUDUKAN				
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
		a. Indentitas Penduduk 1. biodata 2. nomor induk kependudukan 3. kartu tanda penduduk 4. kartu keluarga 5. advokasi indentitas penduduk				
		b. perpindahan penduduk dalam wilayah indonesia 1. perpindahan penduduk WNI 2. perpindahan penduduk warga WNA dalam wilayah Indonesia 3. perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara 4. daerah terbelakang 5. bedol desa	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
		c. perpindahan penduduk antar Negara 1. penduduk Indonesia ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. orang asing tinggal sementara</li> <li>3. orang asing tinggal tetap</li> <li>4. perpindahan penduduk antar negara (pelintas antar tradisional)</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. akibat bencana alam</li> <li>2. akibat kerusuhan sosial</li> <li>3. pendaftaran penduduk daerah terbelakang</li> <li>4. pendaftaran penduduk rentan</li> </ul> </li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	472	<b>PENCATATAN SIPIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelahiran, kematian, dan advokasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1. kelahiran</li> <li>2. kematian</li> <li>3. advokasi kematian dan kelahiran</li> <li>4. perkawinan, perceraian, dan advokasi</li> </ul> </li> <li>b. perkawinan agama islam <ul style="list-style-type: none"> <li>1. perkawinan agama non islam</li> <li>2. perceraian agama islam</li> <li>3. perceraian agama non islam</li> <li>4. advokasi perkawinan dan perceraian</li> </ul> </li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis

		<p>c. pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengangkatan anak</li> <li>2. pengakuan anak</li> <li>3. pengesahan anak</li> <li>4. perubahan akta</li> <li>5. pembatalan akta</li> <li>6. advokasi pengurusan</li> <li>7. pengangkatan, pengakuan, DNA pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
		<p>d. pencatatan kewarganegaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. akibat perkawinan</li> <li>2. akibat kelahiran</li> <li>3. non perkawinan</li> <li>4. non kelahiran</li> <li>5. perubahan WNI dan ke WNA</li> <li>6. perubahan WNA ke WNI</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
473	INFORMASI KEPENDUDUKAN	<p>a. teknologi informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perangkat keras</li> <li>2. perangkat lunak</li> <li>3. jaringan komunikasi data</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<p>b. kelembagaan dan sumber daya informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. daerah maju</li> <li>2. daerah berkembang</li> <li>3. daerah terbelakang</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<p>c. pengolahan data kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendaftaran penduduk</li> <li>2. kejadian vital penduduk</li> <li>3. penduduk non registrasi</li> </ol>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<p>d. pelayanan informasi kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. media elektronik</li> <li>2. media cetak</li> <li>3. outlet</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
474		<b>PERKEMBANGAN PENDUDUK</b>				
		<p>a. pengurangan kuantitas penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. struktur jumlah</li> <li>2. komposisi</li> <li>3. fertilitas</li> <li>4. kesehatan reproduksi</li> <li>5. morbiditas penduduk</li> <li>6. mortalitas penduduk</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<p>b. pengembangan kuantitas penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anak dan remaja</li> <li>2. penduduk usia produktif</li> <li>3. penduduk lanjut usia</li> <li>4. gender</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

		<p>c. penataan persebaran penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. migrasi antar wilayah</li> <li>2. migrasi internasional</li> <li>3. urbanisasi</li> <li>4. sementara</li> <li>5. migrasi non permanen</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<p>d. perlindungan dan pemberdayaan penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem perlindungan penduduk</li> <li>2. pelayanan kelemagaan ekonomi</li> <li>3. pelayanan kelembagaan sosial budaya</li> <li>4. partisipasi masyarakat</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<p>e. pengembangan wawasan kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendidikan jalur sekolah</li> <li>2. pendidikan jalur luar sekolah</li> <li>3. pendidikan jalur masyarakat</li> <li>4. pembangunan berwawasan kependudukan</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
475	<p><b>PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN</b></p>	<p>a. indikator kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan penetapan dan pengembangan indikator</li> </ol>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>kependudukan</li> <li>2. pemanfaatan indikator kependudukan</li> <li>3. sosialisasi indikator kependudukan</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. proyeksi penduduk               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan</li> <li>2. pemanfaatan proyeksi kependudukan</li> </ul> </li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. analisis dampak kependudukan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan</li> <li>2. pemanfaatan analisis dampak kependudukan</li> </ul> </li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. penyerasian kebijakan lembaga non pemerintah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. lembaga internasional</li> <li>2. lembaga masyarakat dan nirlaba</li> <li>3. lembaga usaha swasta</li> </ul> </li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. penyerasian kebijakan lembaga pemerintah               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. lembaga pemerintah</li> <li>2. pemerintah provinsi dan kota</li> <li>3. pemerintah kabupaten</li> </ul> </li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

	f. analisis berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
476	MONITORING	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
477	EVALUASI	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
479	KELUARGA BERENCANA	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
480	MEDIA MASSA				
481	PENERBITAN 1. surat kabar 2. majalah 3. buku 4. penerjemahan 5. buletin 6. jurnal 7. kliping	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
482	RADIO 1. RRI 2. Non RRI 3. Radio luar negeri 4. Radio internet	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

483	TELEVISI 1. TVRI 2. swasta lokal, nasional 3. luar negeri 4. televisi internet	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
484	FILM	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
485	PERS 1. kewartawanan 2. wawancara 3. informasi nasional	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
486	GRAFIKA	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
487	PENERANGAN Berkas tentang pameran non komersil	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
488	OPERATION ROOM Berkas tentang operation room terkait media massa	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
489	HUBUNGAN MASYARAKAT Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 1,



WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI  
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

VI. PEREKONOMIAN

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PEREKONOMIAN</li> <li>• Dewan Stabilitas</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	501	- PENGADAAN PANGAN	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	502	- PENGADAAN SANDANG	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	503	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya( IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
2	510	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PERDAGANGAN/ TATANILAGA</li> <li>- Promosi perdagangan pekan raya</li> <li>- iklan</li> <li>- pameran / ekspo komersil</li> <li>- pelarangan</li> <li>- tera/ timbang</li> <li>- ulang/ kalibrasi</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

511	<p>Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sembilan bahan pokok</li> <li>- pasar tradisional</li> <li>- pasar modern</li> <li>- pertokoan, kaki lima, kios</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
512	EKSPOR	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
513	IMPOR	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
516	PERGUDANGAN, TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK ORANG	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
518	KOPERASI (BUUD,KUD,KUR)	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
3	PERTANIAN				
520					
521	<p>Tanaman pangan program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bimas /inmas termasuk kredi</li> <li>- penyuluhan</li> <li>- Produksi</li> <li>- padi/ panen</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- palawija</li> <li>- jagung</li> <li>- ketela pohon, ubi- ubian</li> <li>- hortikultura</li> <li>- sayuran / buah- buahan</li> <li>- tanaman hias</li> <li>- pembudidayaan rumput laut</li> </ul> <p>Saran usaha pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peralatan</li> <li>- pembibitan</li> <li>- pupuk</li> </ul> <p>Perlindungan Tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyakit, penyakit daun, penyakit batang,</li> <li>- hama- hama serangga, wereng, walang sangit, tungro, hama tikus dan sejenisnya</li> <li>- pemberantasan hama, meliputi ; penyemprotan, penyiangian, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara</li> <li>- pestisida</li> </ul> <p>Tanah pertanian pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persawahan</li> <li>- perladangan</li> <li>- kebun</li> <li>- rumput ikan laut</li> <li>- KTA/ Lahan kritis</li> <li>- pengusaha petani</li> <li>- bina usaha</li> <li>- pasca panen</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemasaran hasil</li> <li>- kelompok tani</li> <li>- rukun tani</li> </ul>				
522	<ul style="list-style-type: none"> <li>- program Kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hak pengusahaan hutan</li> <li>- tata guna hutan</li> <li>- perpetaan hutan</li> <li>- tumpangsari</li> <li>- produksi <ul style="list-style-type: none"> <li>- kayu</li> <li>- non kayu</li> </ul> </li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
523	Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- program</li> <li>- penyuluhan</li> <li>- teknologi</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- produksi</li> <li>- pelelangan</li> <li>- usaha perikanan</li> <li>- pembibitan</li> <li>- daerah penangkapan</li> <li>- pertambakan, meliputi; tambak ikan deras , tambak udang dan lain-lain</li> <li>- sarana</li> <li>- peralatan</li> <li>- kapal</li> <li>- pelabuhan</li> </ul>				
524	Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- produksi</li> <li>- susu ternak rakyat</li> <li>- telur</li> <li>- daging</li> <li>- kulit</li> <li>- sarana usaha ternak</li> <li>- pembibitan</li> <li>- kandang ternak</li> <li>- kesehatan hewan</li> <li>- penyakit hewan</li> <li>- pos kesehatan hewan</li> <li>- tes pullorum</li> <li>- karantina</li> <li>- pemberantasan penyakit hewan termasuk upaya pencegahannya</li> <li>- perunggasan</li> <li>- pengembangan ternak</li> <li>- inseminasi bantuan</li> <li>- pembibitan / bibit unggul</li> <li>- penyebaran ternak</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- makanan ternak</li> <li>- tempat pemotongan hewan</li> <li>- data peternakan</li> </ul>				
	525	Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- program</li> <li>- produksi</li> <li>- karet</li> <li>- teh</li> <li>- tembakau</li> <li>- tebu</li> <li>- cengkeh</li> <li>- kopra</li> <li>- kopi</li> <li>- cokelat</li> <li>- aneka tanaman</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
4	530	Perindustrian <ul style="list-style-type: none"> <li>- undang-undang gangguan</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	531	Industri logam	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	532	Industri mesin/ elektronik	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	533	Industri kimia/ farmasi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	534	Industri tekstil	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	535	Industri makanan/ minuman	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

536	Aneka industri/ perusahaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
537	Aneka kerajinan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
538	Usaha negara / BUMN - perusahaan jawatan - perusahaan umum - persero, / PT, CV, UDFirma	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
539	Perusahaan daerah/ BUMD	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
540	Pertambangan/ Kesamuderaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
541	BBM	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
542	Gas bumi - eksploitasi/ Pengeboran - kotrak kerja - pengolahan tengki, pompa tanker	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
543	Logam Mulia - emas - intan/ batu mulia - perak	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
544	Logam - timah - aluminium, boxit - besi, termasuk besi tua - tembaga	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

545	Aneka tambang - batu bara	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
546	Geologi - vulkonologi - pengawasan gunung berapi - sumur artesis, air bawah tanah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
547	Hidrologi	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
548	kesamuderaan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	PERHUBUNGAN				
6	- Perhubungan	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
551	Perhubungan Darat - lalulintas jalan raya, sungai, danau - keamanan lalulintas, rambu-rambu - angkutan jalan raya - perizinan - alat angkutan - terminal - perkeretaapian	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
554	Pos	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
555	Telekomunikasi - Telepon / HT - telegram	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- telex, SSB, Faximile</li> <li>- Satelit, Internet</li> <li>- Stasiun Bumi, Parabola</li> <li>- Menara Telekomunikasi</li> </ul>					
556	Pariwisata dan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- obyek kepariwisataan</li> <li>- perhotelan</li> <li>- travel servise</li> <li>- tempat rekreasi</li> <li>- tempat sejarah / monumen</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
557	Meteorologi <ul style="list-style-type: none"> <li>- ramalan cuaca</li> <li>- curah hujan</li> <li>- kemarau panjang</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
	TENAGA KERJA					
7	Tenaga Kerja	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
561	Upah	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
562	Penempatan tenaga kerja, TKI Outsourcing	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
563	Latihan kerja , magang	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
564	Tenaga Sukarela <ul style="list-style-type: none"> <li>- butsi</li> <li>- padat karya</li> </ul>	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
565	Perselisihan perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	

	566	Keselamatan kerja	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
	567	Pemutusan Hubungan kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
	568	Kesejahteraan buruh ( kesehatan, perumahan, dll)	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
	569	Tenaga orang asing	Biasa /Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	
		PERBANKAN / MONETER					
	8	570	Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		571	Modal domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		572	Modal asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		573	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
		575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis
	9	580	Perbankan / Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kenerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
583	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
585	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
586	Alat pembayaran, cek, giro, wesel, transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
588	Hutang Negara/ obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
589	moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
10	590 Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
591	Tata Guna Tanah - pemetaan dan pengukuran - perpetaan - penyediaan data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- fatwa tata guna tanah</li> <li>- tanah kritis</li> </ul>				
592	Landreform	<ul style="list-style-type: none"> <li>- redistribusi</li> <li>- pendaftaran pemilikan dan pengurusan</li> <li>- penentuan tanah obyek landreform</li> <li>- pembagian tanah obyek landreform</li> <li>- sangketa retribusi</li> <li>- tanah obyek landreform</li> <li>- ganti rugi</li> <li>- ganti rugi tanah kelebihan, meliputi sangketa ganti rugi tanah kelebihan</li> <li>- ganti rugi tanah absentece, meliputi sangketa ganti rugi absentece</li> <li>- ganti rugi tanah partikelir, meliputi sangketa ganti rugi tanah partikelir</li> <li>- bagi hasil</li> <li>- penetapan imbalan bagi hasil</li> <li>- pelaksanaan perjanjian bagi hasil</li> <li>- sangketa perjanjian bagi hasil</li> <li>- gadai tanah</li> <li>- pendaftaran pelaksanaan gadai tanah</li> <li>- pelaksanaan gadai tanah</li> <li>- sangketa gadai tanah</li> <li>- bimbingan dan penyuluhan</li> <li>- pengembangan</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- yayasan dana landreform ( YDL)</li> </ul>		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
593	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurusan hak- hak tanah</li> <li>- penyusunan program dan bimbingan teknis</li> <li>- sewa tanah</li> <li>- sewa tanah untuk tanaman tertentu, tebu, tembakau, rosella, corchorus</li> <li>- hak milik</li> <li>- perorangan</li> <li>- badan hukum</li> <li>- hak pakai</li> <li>- perseorangan, warga negara Indonesia ( WNI)</li> <li>- perseorangan , Warga Negara Asing ( WNA )</li> <li>- badan hukum</li> <li>- badan hukum Indonesia</li> <li>- badan hukum asing, kedutaan, konsulat kantor dagang asing</li> <li>- tanah gedung- gedung negeri</li> <li>- guna usaha</li> <li>- perkebunan besar</li> <li>- perkebunan rakyat</li> <li>- peternakan</li> <li>- perikanan</li> <li>- kehutanan</li> <li>- hak guna bunganan</li> <li>- perorangan</li> <li>- badan hukum</li> <li>- P3MB/ panitia penguasaan Milik Belanda )</li> </ul>					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- badan hukum asing belanda - PRK No. 5165</li> <li>- pemulihan hak PerPres 4/1960</li> <li>- hak pengelolaan</li> <li>- PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial, Estase, Real Estrase</li> <li>- perusahaan daerah</li> <li>- pembangunan perumahan</li> <li>- sangketa tanah</li> <li>- peradilan perkara tanah (lihat klasifikasi 183)</li> <li>- pencabutan dan pembebasan tanah</li> <li>- pencabutan hak</li> <li>- pembebasan tanah</li> <li>- ganti rugi tanah</li> </ul>				
		<b>Pendaftaran Tanah</b>				
594		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran/ pemetaan</li> <li>- fotogrametri</li> <li>- terristik</li> <li>- triangulasi</li> <li>- peralatan</li> <li>- dana pengukuran (Permen Agraria No.61/ 1965)</li> <li>- sertifikat</li> <li>- pejabat pembuat akta tanah (PPAT)</li> <li>- ajudikasi</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis
595		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehan Tramigrasi</li> <li>- tata guna tanah</li> <li>- landreform</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit Kerja	Bidang Teknis

	- pengurusan hak - hak tanah - pendaftaran tanah				
596	Tanah Kosong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 39 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN  
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

No	Klasifi kasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Tata bangunan konstruksi, dan industri konstruksi	Biasa / terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	602	Kontraktor Pemborong <ul style="list-style-type: none"> <li>- tender / lelang</li> <li>- penunjukan langsung</li> <li>- kualifikasi</li> <li>- daftar rekanan mampu (DRM)</li> <li>- tanda daftar rekanan (TDR)</li> </ul>	Biasa / terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa / terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>- tanah dan batu</li> <li>- aspal, aspal buatan, aspal alam</li> <li>- besi dan logam lainnya</li> <li>- besi beton</li> <li>- besi profil</li> <li>- paku</li> <li>- aluminium, profil</li> </ul>	Biasa / terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan bahan perlindungan dan pengawet</li> <li>- semen</li> <li>- kayu seperti balok, papan, dolken</li> <li>- bahan penutup atap</li> <li>- alat- alat penggantung dan pengunci</li> <li>- bahan –bahan bangunan lainnya</li> </ul>				
605	Instalasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- instalasi bangunan</li> <li>- instalasi listrik</li> <li>- instalasi air sanitasi</li> <li>- instalasi pengatur udara</li> <li>- instalasi akustik</li> <li>- instalasi cahaya, penerangan</li> </ul>	Biasa / terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis
606	Konstruksi pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- konstruksi pencegahan terhadap kebakaran</li> <li>- konstruksi pencegahan terhadap gempa</li> <li>- konstruksi pencegahan terhadap angin udara</li> <li>- konstruksi pencegahan terhadap kekaduhan</li> <li>- konstruksi pencegahan terhadap gas / eksplosive</li> <li>- konstruksi pencegahan terhadap serangga</li> <li>- konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / Unit kerja	Bidang Teknis

2	610	<p>Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan waduk</li> <li>- bendungan</li> <li>- tanggul</li> <li>- pelimpahan banjir</li> <li>- menara pengambilan</li> <li>- bangunan pengambilan</li> <li>- bendungan</li> <li>- bendungan dengan pintu bilas</li> <li>- bendungan dengan pompa</li> <li>- pengambilan bebas</li> <li>- pengambilan bebas dengan pompa</li> <li>- sumur dengan pompa</li> <li>- kantong lumpur</li> <li>- silt esktraktor</li> <li>- escape channel</li> <li>- Bangunan pembawa</li> <li>- saluran</li> <li>- bangunan</li> <li>- box tersier</li> <li>- got miring</li> <li>- talang</li> <li>- syphon</li> <li>- gorong-gorong</li> <li>- pelimpah samping</li> <li>- Bangunan Pembuang</li> <li>- saluran</li> <li>- bangunan</li> <li>- gorong-gorong pembuang</li> <li>- talang pembuang</li> <li>- syphon pembuang</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
---	-----	--	---------	------------	---	---------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan Lainnya</li> <li>- jalan</li> <li>- jembatan</li> <li>- tangga cuci</li> <li>- kubangan kerbau</li> <li>- waduk lapangan</li> <li>- bangunan penunjang</li> <li>- jaringan telepon</li> <li>- stasiun agro</li> </ul>				
611	<p>Folder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tanggul keliling</li> <li>- tanggul</li> <li>- bangunan penutup sungai</li> <li>- jembatan</li> <li>- bangunan pembawa</li> <li>- saluran</li> <li>- stasiun pompa pemasukan</li> <li>- bangunan bagi</li> <li>- gorong-gorong</li> <li>- syphon</li> <li>- Bangunan Pembawa</li> <li>- saluran</li> <li>- stasiun pompa pemasukan</li> <li>- bangunan bagi</li> <li>- gorong - gorong</li> <li>- syhphon</li> <li>- bangunan pembuang</li> <li>- stasiun pompa pembuang</li> <li>- saluran</li> <li>- pintu air pembuangan</li> <li>- gorong- gorong pembuangan</li> <li>- syphon pembuangan</li> </ul>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu keneja OPD / Unit Kerja	Bidang Teknis	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan lainnya</li> <li>- bangunan</li> <li>- rumah petugas eksploitasi</li> </ul>				
612	<b>Pasang surrut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan pembawa</li> <li>- saluran</li> <li>- bangunan pintu pemasukan</li> <li>- bangunan pembuang</li> <li>- saluran</li> <li>- bangunan pintu pembuang</li> <li>- bangunan lainnya</li> <li>- kolam pasang</li> <li>- saluran</li> <li>- bangunan</li> <li>- jalan</li> <li>- jembatan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
613	<b>Pengendalian Sungai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan pengamanan tanggul banjir</li> <li>- pintu pengatur banjir</li> <li>- klep pengatur banjir</li> <li>- tembok pengamanan talud krib</li> <li>- kantung lumpur</li> <li>- chek – dam</li> <li>- syphon</li> <li>- saluran pengamanan</li> <li>- saluran banjir</li> <li>- saluran drainage</li> <li>- corepure</li> <li>- bangunan lainnya</li> <li>- warning system</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis

		- stasiun				
	614	Pengamanan pantai - tanggul - krib - bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
	615	Air tanah - stasiun pompa - bangunan pembawa - bangunan pembuang - bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis
3	620	Jalan kota - daerah penguasaan - tanah - tanaman - bangunan - bangunan sementara - jalan sementara - jembatan sementara - kantor proyek - gudang proyek - barak kerja - laboratorium lapangan - rumah - badan jalan - pekerjaan tanah - stabilitasi - perkerasan - lapis pondasi bawah - lapis pondasi - lapis permukaan - drainage - parit tanah - gorong- gorong	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ Unit kerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- buku trotoir</li> <li>- tanah</li> <li>- perkerasan</li> <li>- pasangan</li> <li>- median</li> <li>- tanah</li> <li>- tanaman</li> <li>- perkerasan</li> <li>- pasangan</li> <li>- daerah samping</li> <li>- tanaman</li> <li>- pagar</li> <li>- bangunan perlengkapan dan pengamanan</li> <li>- rambu- rambu tanda lalu lintas</li> <li>- lampu penerangan</li> <li>- lampu pengatur lalu lintas</li> <li>- patok- patok KM</li> <li>- patok- patok ROW (Sempadan)</li> <li>- rel pengamanan</li> <li>- pagar</li> <li>- turap ,penahan</li> <li>- bronjong</li> </ul>				
621	Jalan Luar Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- daerah penguasaan</li> <li>- tanah</li> <li>- tanaman</li> <li>- bangunan</li> <li>- bangunan sementara</li> <li>- jalan sementara</li> <li>- jembatan sementara</li> <li>- kantor proyek</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- gedung proyek</li> <li>- berak kerja</li> <li>- laboratorium lapangan</li> <li>- rumah</li> <li>- badan jalan</li> <li>- pekerjaan tanah</li> <li>- stabilisasi</li> <li>- perkerasan</li> <li>- lapis pondasi</li> <li>- lapis pondasi bawah</li> <li>- lapis permukaan</li> <li>- drainage</li> <li>- parit</li> <li>- gorong-gorong</li> <li>- sub drainage</li> <li>- trotoar</li> <li>- tanah</li> <li>- perkerasan</li> <li>- median</li> <li>- tanah</li> <li>- tanaman</li> <li>- perkerasan</li> <li>- pasangan</li> <li>- daerah samping</li> <li>- tanaman</li> <li>- pagar</li> <li>- bangunan perlengkapan dan pengamanan</li> <li>- rambu- rambu tanda lalu lintas</li> <li>- lampu penerangan</li> <li>- lampu pengatur lalu lintas</li> <li>- patok- patok KM</li> <li>- patok- patok ROW</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Sempadan)</li> <li>- rel pengamanan</li> <li>- pagar</li> <li>- turap ,penahan bronjong</li> </ul>				
	623	Jalan Layang	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
4	630	<p>Jembatan pada jalan kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- daerah penguasaan</li> <li>- tanah</li> <li>- tanaman</li> <li>- bangunan</li> <li>- bangunan sementara</li> <li>- jalan sementara</li> <li>- jembatan sementara</li> <li>- kantor proyek</li> <li>- gudang proyek</li> <li>- barak kerja</li> <li>- laboratorium lapangan</li> <li>- rumah</li> <li>- pekerjaan tanah</li> <li>- galian tanah</li> <li>- timbunan tanah</li> <li>- pondasi</li> <li>- pondasi kepala jalan</li> <li>- pondasi pilar</li> <li>- angker</li> <li>- bangunan bawah</li> <li>- kepala jembatan</li> <li>- pilar</li> <li>- pylon</li> <li>- landasan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan</li> <li>- gelagar</li> <li>- lantai</li> <li>- perkerasan</li> <li>- jalan orang/ trotoar</li> <li>- sandaran</li> <li>- talang air</li> <li>- bangunan/ pengamananan</li> <li>- turap/ penahan</li> <li>- bronjong</li> <li>- strek dam</li> <li>- kist dam</li> <li>- corepure</li> <li>- krib</li> <li>- bangunan perlengkapan</li> <li>- rambu- rambu tanda lalu lintas</li> <li>- lampu penerangan</li> <li>- lampu pengatur lalu lintas</li> <li>- patok- patok KM</li> <li>- patok- patok ROW (Sempadan)</li> <li>- rel pengamananan</li> <li>- pagar</li> <li>- oprit</li> <li>- badan</li> <li>- perkerasan</li> <li>- drainage</li> <li>- buku</li> <li>- median</li> </ul>				
632	Jembatan pada jalan luar kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- daerah pengusahaan</li> <li>- tanah</li> <li>- tanaman</li> <li>- bangunan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan sementara</li> <li>- jalan sementara</li> <li>- jembatan sementara</li> <li>- kantor proyek</li> <li>- gudang proyek</li> <li>- barak kerja</li> <li>- laboratorium lapangan</li> <li>- rumah</li> <li>- pekerjaan tanah</li> <li>- galian tanah</li> <li>- timbunan tanah</li> <li>- pondasi</li> <li>- pondasi kepala jalan</li> <li>- pondasi pilar</li> <li>- anker</li> <li>- bangunan bawah</li> <li>- kepala jembatan</li> <li>- pilar</li> <li>- pylon</li> <li>- landasan</li> <li>- bangunan atas</li> <li>- gelagar</li> <li>- lantai</li> <li>- perkerasan</li> <li>- jalan orang/ trotoar</li> <li>- sandaran</li> <li>- talang air</li> <li>- bangunan pengamanan</li> <li>- turap/ penahan</li> <li>- bronjong</li> <li>- strek dam</li> <li>- kist dam</li> <li>- corepure</li> <li>- krib</li> </ul>				
--	--	---	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan perlempang</li> <li>- rambu-rambu /tanda lalu lintas</li> <li>- lampu penerangan</li> <li>- lampu lalu lintas</li> <li>- patok- patok KM</li> <li>- rel- rel pengamanan</li> <li>- pagar</li> <li>- oprit</li> <li>- badan</li> <li>- perkerasan</li> <li>- drainage</li> <li>- baku</li> <li>- median</li> </ul>				
5	640	<p>Bangunan pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gedung pengadilan</li> <li>- rumah pejabat negara</li> <li>- gedung DPR</li> <li>- gedung balaikota</li> <li>- penjara</li> <li>- perkantoran</li> <li>- rumah dinas</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	642	<p>Bangunan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taman kanak-kanak</li> <li>- SD/ dan Sekolah menengah</li> <li>- perguruan tinggi</li> <li>- tempat kursus/ lembaga pendidikan</li> <li>- tempat diklat</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	643	<p>Bangunan rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan olah raga</li> <li>- gedung kesenian</li> <li>- gedung pemancar</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

644	Bangunan perdagangan - supermarket, dept. stor - gedung perdagangan - bank - perkantoran	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
645	Bangunan pelayanan umum - mandi, cuci, kakus ( MCK) umum - gedung parkir - rumah sakit/ puskesmas - gedung telkom - terminal angkutan udara - terminal angkutan air - terminal angkutan darat - bangunan keagamaan - halte/ shelter	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
646	Bangunan peninggalan sejarah - monumen - candi - keraton - rumah tradisional - heritage	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
647	Bangunan industri	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
648	Bangunan tempat tinggal - rumah perkantoran - inti/ sederhana - sedang/ mewah - rumah susun - rumah pedesaan - rumah percontohan - real estate	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

649	<p>Elemen bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pondasi</li> <li>- di atas tiang</li> <li>- dinding</li> <li>- penahan beban</li> <li>- tidak menahan beban</li> <li>- atap</li> <li>- lantai / langit-langit</li> <li>- suspended</li> <li>- sofit</li> <li>- pintu / jendela</li> <li>- pintu hermonik</li> <li>- pintu biasa</li> <li>- pintu sorong</li> <li>- pintu kayu</li> <li>- jendela sorong</li> <li>- jendela vertical</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis	
6	650	<p>Tata kota</p> <p>Daerah perdagangan / pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- daerah pusat perbelanjaan</li> <li>- daerah perkantoran</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	651	Daerah Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	653	<p>Daerah Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kepadatan rendah</li> <li>- kepadatan tinggi</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	654	<p>Daerah Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- industri berat</li> <li>- industri ringan</li> <li>- industri rumah</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	655	<p>Daerah Rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taman kota</li> <li>- tempat olahraga dan bermain</li> <li>- ruang terbuka</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

656	Transportasi - jaringan jalan - penerangan jalan - jaringan kereta api - jaringan sungai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis	
657	Assainering - saluran pengumpulan - instalasi pengolahan - bangunan - unit desinfektan - unit perpompaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis	
658	Kesehatan Lingkungan - Persampahan - bangunan pengumpul - bangunan pemusnahan - pengotoran udara - pengotoran air - air bangunan industri - kegaduhan / polusi suara - kebersihan kota	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis	
7	660	Tata lingkungan daerah hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	662	Daerah pertanian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	663	Daerah permukiman	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	664	Pusat pertumbuhan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

665	<p>Taransportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jaringan jalan</li> <li>- jaringan kereta api</li> <li>- jaringan sungai</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
8	<p>870 Ketenagaan listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kelistrikan</li> <li>- kelistrikan PLN</li> <li>- kelistrikan non PLN</li> <li>- pembangkit tenaga listrik</li> <li>- PLTA (pembangkit listrik tenaga air)</li> <li>- PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel)</li> <li>- PLTG (pembangkit listrik tenaga gas)</li> <li>- PLTM (pembangkit listrik tenaga matahari)</li> <li>- PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir)</li> <li>- PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi)</li> <li>- PLTU (pembangkit listrik tenaga uap)</li> <li>- transmisi tenaga listrik</li> <li>- gardu induk / gardu penghubung / gardu travo</li> <li>- saluran udara tegangan tinggi</li> <li>- kabel bawah tanah</li> <li>- distribusi tenaga listrik</li> <li>- gardu distribusi</li> <li>- tegangan rendah</li> <li>- tegangan menengah</li> <li>- jaringan bawah tanah</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengusahaan listrik</li> <li>- sambungan listrik</li> <li>- penjualan tenaga listrik</li> <li>- tarif listrik</li> </ul>				
	672	Tenaga air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	673	Tenaga minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	674	Tenaga matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	675	Tenaga uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	676	Tenaga lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	9	peralatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	10	Air minum intake <ul style="list-style-type: none"> <li>- broncaptering</li> <li>- sumur</li> <li>- bendungan</li> <li>- saringan</li> <li>- pintu air</li> <li>- saluran pembawa</li> <li>- alat ukur</li> <li>- perpompaan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
	692	Transmisi air baku <ul style="list-style-type: none"> <li>- perpipaan</li> <li>- katup udara</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- katub penguras</li> <li>- bak pelepas tekanan</li> <li>- jembatan pipa</li> <li>- syphon</li> </ul>				
693	<p>Instalasi pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bangunan ukur</li> <li>- bangunan aerasi</li> <li>- bangunan pengendapan</li> <li>- bangunan pembunuh bahan kimia</li> <li>- bangunan pengaduk</li> <li>- bangunan saringan</li> <li>- perpompaan</li> <li>- clear hell</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis
694	<p>Distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reservoir menara bawah tanah</li> <li>- menara</li> <li>- reservoir dibawah tanah</li> <li>- perpipaan</li> <li>- perpompaan</li> <li>- jembatan pipa</li> <li>- syphon</li> <li>- hydran</li> <li>- hydran umum</li> <li>- hydran kebakaran</li> <li>- katub</li> <li>- katub udara</li> <li>- katub pelepasan</li> <li>- bak pelepasan tekanan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang teknis

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018  
 BUPATI SIJUNJUNG

dito

YUSWIR ARIPTIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

WANDRI FAHRIZAL,SH  
 Pembina Tk. I, IV/b  
 NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI SUJUNJUNG  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN  
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SUJUNJUNG

VIII. PENGAWASAN

No	Klasifi kasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
	PWS	PENGAWASAN				
	700	- Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	701	- Bidang urusan dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	702	- Bidang peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	703	- Bidang kekayaan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	704	- Bidang perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan / Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

	705	- Bidang perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	707	- Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	708	- Bidang konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	709	- Bidang perjalanan dinas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	711	- Bidang pemerintahan pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	712	- Bidang pemerintahan provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	713	- Bidang pemerintahan Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

714	- Bidang pemerintahan desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
715	- Bidang MPR/DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
716	- Bidang DPRD Provinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
717	- Bidang DPRD Kabupaten / Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
718	- Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
719	- Bidang hubungan luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
3	Bidang Politik						
720	- Bidang Keperawatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
721	- Bidang Keperawatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		
722	- Bidang organisasi kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis		

	723	- Bidang organisasi profesi dan fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	724	- Bidang organisasi pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	725	- Bidang organisasi buruh, tani, dan nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	726	- Bidang organisasi wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	727	- Bidang pemeliharaan umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
4	730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	731	- Bidang pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	732	- Bidang Kemilteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

733	- Bidang perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
734	- Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
735	- Bidang kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
736	- Bidang bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
737	- Bidang kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
5	740 Bidang kesejahteraan rakyat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
	741 - Bidang pembangunan desa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
	742 - Bidang pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	

743	- Bidang kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
744	- Bidang kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
745	- Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
746	- Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
747	- Bidang kependudukan	Terbuka	Eselon III	memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
748	- Bidang Media Massa	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
6	- BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
751	- Bidang perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

752	- Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
753	- Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
754	- Bidang Pertambangan/ Kesamuderaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
755	- Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
756	- Bidang Tenaga kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
757	- Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
758	- Bidang tentang perbankan/ Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
759	- Bidang tentang agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	761	- Bidang pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	762	- Bidang jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	763	- Bidang jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	764	- Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	765	- Bidang tata kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	766	- Bidang lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	767	- Bidang ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	768	- Bidang peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

769	- Bidang air minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
8	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>				
781	- Bidang pengadaan pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
782	- Bidang mutasi pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
783	- Bidang kedudukan pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
784	- Bidang kesejahteraan pegawai	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
785	- Bidang cuti	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
786	- Bidang penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
787	- Bidang Tata Usaha Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

788	- Bidang pemberhentian pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
789	- Bidang pendidikan pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis	
9	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	- Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	792	- Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	793	- Bidang verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	794	- Bidang pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	795	- Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
	796	- Bidang pembinaan Kebendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

797	- Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis
798	- Bidang Perbendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang teknis

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

↓ KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, ↓



WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN  
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

No	Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	902	APBN	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	903	APBN, RAPBD - Hibah - Bantuan Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	904	Dana Alokasi Umum - Berkas pengajuan - penyusunan DAU - Laporan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	905	Dana Alokasi Khusus - Berkas Pengajuan - penggunaan DAK - Laporan - Dana bagi hasil	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	906	Dana cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
2	ANGGARAN				
910	ANGGARAN				
911	Rutin / Murni - ABDD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda PBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
912	Pembangunan /kegiatan - pengusunan anggaran pembiayaan / kegiatan penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
913	Anggaran belanja tambahan / Anggaran perubahan APBD - mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
914	Daftar isian kegiatan ( DIK)Renaca kegiatan Anggaran ( RKA) - daftar usulan kegiatan (DUK) - Pengusulan pra RKA - pengusulan RKA - Pembahasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
915	Daftar isian proyek ( DIP) /dokumen pelaksanaan Anggaran ( DPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

	- Daftar usulan proyek - daftar isian pengguna anggaran (DIPA)					
916	Revisi Anggaran / Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
917	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
918	Belanja langsung/ tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
3	OTORISASI/ SKO/ Surat Penyediaan Dana (SPD)					
921	Rutin/ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
922	Pembangunan/ kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
924	Ralat/ SKO/ Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
4	VERIFIKASI					
931	SPM Rutin (daftar p8)/ SPM Murni/ Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	
932	SPM Pembangunan (daftar p8)/ SPM Murni/ Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang	

	933	Penerimaan (daftar p6.p7)/ pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	934	SPJ Rutin/ SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	935	SPJ Pembangunan/ SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	937	SP Pemindehan pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	5	PEMBUKUAN				
	941	Penyusunan perhitungan anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	942	Pernintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( SKAD) - Neraca - catatan anggaran laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
6	950	PERBENDAHARAAN				
	951	Tuntutan Ganti rugi ( ICW pasal 74/ Tuntutan perbendaharaan Tuntutan ganti rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	952	Tutututan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

953	Penghapusan kekayaan daerah - aset daerah - aset bergerak - aset tidak bergerak - aset tidak berwujud	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
954	Pengangkatan / penggantian pimpinan proyek/ PPTK dan pengangkatan/ Pemberhentian bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
955	Specimen tanda tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
956	Surat tagihan piutang ,	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
957	Sisa lebih pembiayaan Anggaran ( SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
7	960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
961	Pemeriksaan kas dan hasil pemeriksaan kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
963	Laporan keuangan bendaharawan - Laporan keuangan bulanan - laporan keuangan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
8	970 PENDAPATAN - Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
971	Perimbangan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

	972	Subsidi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	973	Pajak, ipade, IHH, IHPH, PBB	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	974	Retribusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	975	Bea	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	976	Cukai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	977	Pungutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan propinsi, bantuan pemerintah, dan bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
	979	Pendapatan perusahaan milik negara / Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
9	980	Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
10	990	BENDA HARAWAN				
	991	SKPP / SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang

992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat bidang
-----	-------------	----------	------------	--	--------------------

Muaro Sijunjung, 16 Agustus 2018  
 BUPATI SIJUNJUNG

dto  
 YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, *ri*  
 WANDRI FAHRIZAL,SH  
 Pembina Tk.1/IV.b  
 NIP.19710705 199803 1 011